

KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Muhammad Hanri, Ph.D.

muhammad.hanri06@ui.ac.id

Nia Kurnia Sholihah, M.E.

nia.kurnia91@ui.ac.id

DAFTAR ISI

Perkembangan Kemiskinan
di Indonesia – 1

Menurunnya Kemiskinan,
tetapi Ketimpangan Masih
Jadi Tantangan – 3

Memperkuat Perlindungan
Sosial dan Akses Pelayanan
Dasar untuk Pengentasan
Kemiskinan dan
Ketimpangan – 6



Labor Market Brief dapat
diakses setiap bulan secara
gratis dengan memindai kode
QR di atas atau melalui tautan:
<https://bit.ly/labormarketbrief>

Mengurangi Kemiskinan, Mengatasi Ketimpangan

Ringkasan

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan dua isu utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya tren penurunan kemiskinan secara bertahap, tetapi ketimpangan masih menjadi tantangan yang signifikan. Laporan resmi BPS yang dirilis pada Januari 2025 menggambarkan berbagai perkembangan dalam tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang terjadi sepanjang 2024, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Brief ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia

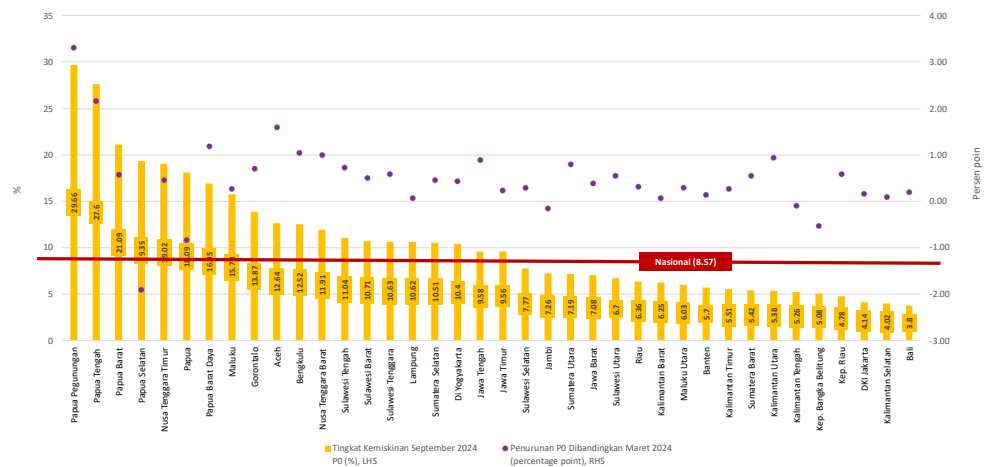
Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 8,57%, mengalami penurunan sebesar 0,46 persen poin (pp) dibandingkan dengan Maret 2024, dan turun 0,79 pp dibandingkan dengan Maret 2023. Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang, mengalami penurunan sebanyak 1,16 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024, serta berkurang 1,84 juta orang dibandingkan Maret 2023.

Penurunan kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Di wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin turun dari 7,09% pada Maret 2024 menjadi 6,66% pada September 2024, sedangkan di pedesaan turun dari 11,79% menjadi 11,34%. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan 0,59 juta orang, sementara di pedesaan jumlahnya tercatat turun sebanyak 0,57 juta orang. Meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan, masih terdapat perbedaan cukup lebar dalam angka kemiskinan di perkotaan dan pedesaan.

Faktor utama yang mendukung penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil pada tahun 2024. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,35% pada Triwulan III-2024 dibandingkan Triwulan I-2024, dari Rp3.113,02 triliun menjadi Rp3.279,59 triliun. Selain itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 2,63%, dari

Rp1.659,86 triliun pada Triwulan I-2024 menjadi Rp1.703,46 triliun pada Triwulan III-2024. Peningkatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 23,54% juga turut berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan yang bergantung pada sektor ini.

Sementara itu, Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp595.242 per kapita per bulan, meningkat 2,11% dibandingkan dengan Maret 2024. Garis Kemiskinan ini terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (Rp443.433 atau 74,50%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (Rp151.809 atau 25,50%). Secara rata-rata, setiap rumah tangga miskin memiliki 4,71 anggota, sehingga Garis Kemiskinan per rumah tangga adalah sekitar Rp2.803.590 per bulan.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan dan Penurunan Kemiskinan Provinsi di Indonesia, September 2024 (%)

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Papua Pegunungan tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, mencapai 29,66%, diikuti oleh Papua Tengah (27,6%), Papua Barat (21,09%), Papua Selatan (19,35%), dan Nusa Tenggara Timur (19,02%). Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di wilayah ini antara lain keterbatasan infrastruktur, akses yang sulit ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta minimnya kesempatan kerja di sektor formal. Selain itu, faktor geografis yang sulit dijangkau juga turut berkontribusi terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Di sisi lain, terdapat beberapa provinsi yang berhasil mempertahankan tingkat kemiskinan rendah. Bali mencatat tingkat kemiskinan terendah,

yakni 3,8%, diikuti oleh Kalimantan Selatan (4,02%), DKI Jakarta (4,14%), Kepulauan Riau (4,78%), dan Kepulauan Bangka Belitung (5,08%). Provinsi-provinsi ini umumnya memiliki sektor pariwisata, perdagangan, dan industri yang lebih berkembang, serta akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan. DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional juga memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah, meskipun masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di beberapa wilayah urban.

Penurunan angka kemiskinan secara signifikan terjadi di beberapa provinsi, dengan Papua Pegunungan mencatat penurunan terbesar, yakni sebesar 3,31 pp. Papua Tengah juga mengalami penurunan kemiskinan yang cukup besar, mencapai 2,16 pp, disusul oleh Aceh (1,59 pp), Papua Barat Daya (1,18 pp), dan Bengkulu (1,04 pp). Penurunan yang signifikan di wilayah Papua kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan investasi infrastruktur, kebijakan desentralisasi, serta program bantuan sosial yang semakin masif diterapkan di daerah tersebut. Selain itu, beberapa program pembangunan di sektor pertanian dan perikanan juga telah meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah pedesaan.

Meskipun demikian, tidak semua provinsi mengalami perbaikan dalam hal kemiskinan. Beberapa wilayah justru mencatat peningkatan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Papua Selatan mengalami kenaikan kemiskinan sebesar 1,91 pp, diikuti oleh Papua (0,83 pp), Kepulauan Bangka Belitung (0,53 pp), Jambi (0,16 pp), dan Kalimantan Tengah (0,09 pp). Peningkatan angka kemiskinan di wilayah-wilayah ini mengindikasikan bahwa masih ada tantangan struktural yang harus diatasi, seperti akses yang terbatas ke pasar kerja formal, ketergantungan pada sektor ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi pasar, serta belum meratanya distribusi bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan.

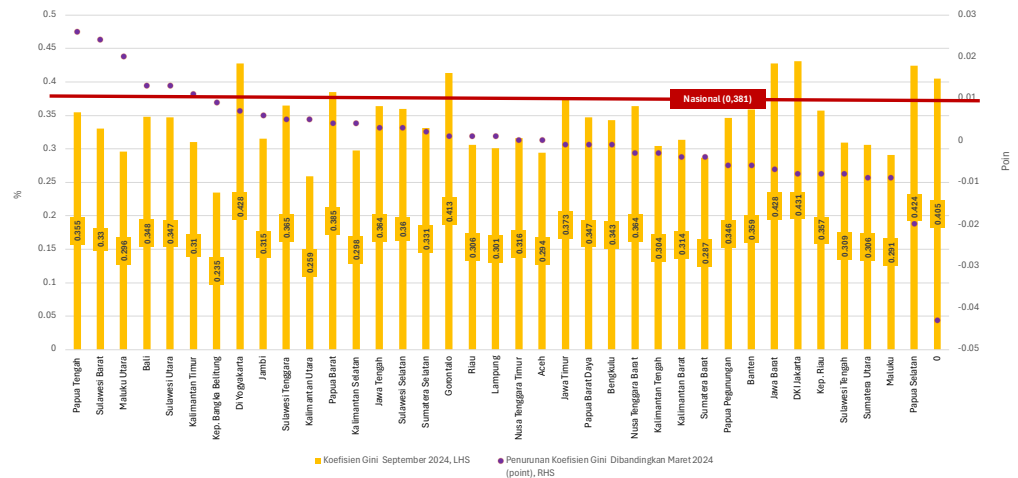
Menurunnya Kemiskinan, tetapi Ketimpangan Masih Jadi Tantangan

Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, tingkat ketimpangan masih menjadi isu yang menantang. Pada September 2024, Gini Ratio Indonesia tercatat sebesar 0,381, mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 0,379, namun lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencapai 0,388.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, Gini Ratio di perkotaan mencapai 0,402, naik dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,399, tetapi lebih rendah dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,409. Sementara itu, di pedesaan, Gini Ratio tercatat sebesar 0,308, sedikit meningkat dibandingkan dengan

Maret 2024 yang sebesar 0,306, tetapi lebih rendah dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,313.

Salah satu indikator lain dari ketimpangan adalah distribusi pengeluaran penduduk. Menurut ukuran Bank Dunia, distribusi pengeluaran kelompok 40% terbawah pada September 2024 adalah sebesar 18,41%, meningkat dari Maret 2024 yang sebesar 18,40% dan lebih tinggi dibandingkan Maret 2023 yang hanya 18,04%. Di perkotaan, angka ini tercatat sebesar 17,44%, sementara di pedesaan lebih tinggi, yaitu 21,39%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketimpangan secara keseluruhan masih ada, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengalami sedikit perbaikan dalam distribusi pengeluaran.



Gambar 2. Koefisien Gini dan Penurunan Koefisien Gini Provinsi di Indonesia, September 2024 (%)

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan yang nyata dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Meskipun tren penurunan kemiskinan terus berlangsung, distribusi pendapatan yang tidak merata tetap menjadi masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Data BPS menunjukkan bahwa Koefisien Gini nasional pada September 2024 berada di angka 0.381. Angka ini memang menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi kesenjangan antarprovinsi masih cukup mencolok. Beberapa daerah menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi, sementara yang lain mengalami peningkatan pemerataan pendapatan.

Perbedaan ketimpangan antar daerah cukup signifikan. Beberapa provinsi memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, seperti DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat dan DI Yogyakarta (0,428), Papua Selatan (0,424), serta Gorontalo (0,413). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut tidak merata, dengan sebagian besar pendapatan terkonsentrasi di kelompok masyarakat tertentu. Kesenjangan ini bisa disebabkan oleh dominasi sektor ekonomi yang masih terbatas pada sektor tertentu, misalnya perkebunan dan pertambangan, di mana manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok perusahaan besar daripada pekerja lokal. Selain itu, terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta minimnya lapangan kerja formal turut memperparah kondisi ketimpangan di daerah-daerah ini.

Sebaliknya, beberapa provinsi menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih rendah, mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Kep. Bangka Belitung (0,235), Kalimantan Utara (0,259), Sumatera Barat (0,287), Maluku (0,291), serta Aceh (0,294) termasuk dalam kelompok daerah dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih rendah. Wilayah-wilayah ini umumnya memiliki sektor ekonomi yang lebih beragam, dengan kehadiran industri, perdagangan, dan jasa yang lebih luas.

Meskipun demikian, tren penurunan ketimpangan juga tampak di beberapa provinsi. Papua Tengah (0,026), Sulawesi Barat (0,024), Maluku Utara (0,02), Bali (0,013), dan Sulawesi Utara (0,013) mencatat penurunan Gini Ratio tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa dikaitkan dengan peningkatan program bantuan sosial dan investasi infrastruktur yang lebih merata di beberapa daerah tersebut. Selain itu, dorongan terhadap sektor UMKM dan industri berbasis masyarakat juga turut membantu meningkatkan kesejahteraan di beberapa wilayah tersebut.

Di sisi lain, tidak semua daerah mengalami perbaikan. Beberapa provinsi justru mengalami peningkatan ketimpangan, seperti Sulawesi Tengah (0,008), Sumatera Utara dan Maluku (0,009), Papua Selatan (0,02), serta Papua (0,043). Kenaikan ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Faktor utama yang menyebabkan meningkatnya ketimpangan di daerah-daerah ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan tingginya ketergantungan pada sektor informal. Urbanisasi yang pesat tanpa diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kesenjangan ekonomi di beberapa provinsi ini.

Tren yang terlihat dari data ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan telah berhasil, ketimpangan masih menjadi tantangan serius yang memerlukan solusi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup jika distribusi pendapatan tetap timpang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih strategis untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat.

Memperkuat Perlindungan Sosial dan Akses Pelayanan Dasar untuk Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan mengatasi ketimpangan di Indonesia, pemerintah dapat menerapkan beberapa strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Beberapa fokus utama yang dapat diperkuat dalam upaya ini mencakup aspek perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap layanan dasar, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem data untuk efektivitas kebijakan.

1. Perlindungan Sosial yang Integratif, Adaptif, dan Inklusif melalui Kartu Kesejahteraan

Pemerintah telah mengembangkan berbagai program perlindungan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta subsidi LPG dan listrik merupakan instrumen penting dalam memastikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa program-program ini dapat berjalan secara terintegrasi, adaptif, dan inklusif.

Integrasi antarprogram diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan agar penggunaan anggaran lebih efisien. Adaptivitas sangat penting agar program perlindungan sosial dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial-ekonomi yang berkembang, baik dalam menghadapi perubahan ekonomi makro maupun dalam situasi darurat seperti bencana alam. Selain itu, inklusivitas menjadi faktor krusial untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar menjangkau semua kelompok rentan, termasuk masyarakat marjinal dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Pemerintah juga perlu memperhatikan skema jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, terutama dalam membantu kelompok miskin yang kesulitan membayar premi jaminan sosial. Dengan perlindungan sosial yang lebih terpadu,

pemerintah dapat meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap risiko ekonomi dan sosial yang dapat memperburuk ketimpangan.

2. Peningkatan Akses dan Inklusivitas terhadap Pelayanan Dasar

Akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan, dan perumahan menjadi faktor fundamental dalam menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang layak terhadap layanan-layanan ini, tanpa terkecuali.

Dalam sektor pendidikan, KIP telah membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masih menjadi isu, terutama terkait kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan. Begitu pula di sektor kesehatan, meskipun program JKN telah memperluas akses layanan kesehatan, tantangan seperti keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi hambatan. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat distribusi tenaga profesional ke seluruh wilayah Indonesia guna memastikan pemerataan layanan dasar yang berkualitas.

Di samping itu, penyediaan akses terhadap transportasi publik yang terjangkau dan subsidi pangan serta perumahan bagi masyarakat miskin juga perlu mendapat perhatian lebih besar. Aksesibilitas terhadap layanan-layanan ini akan membantu meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat, memperluas peluang kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

3. Peningkatan Modal Manusia

Pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar, serta pencegahan stunting.

Stunting masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan manusia di Indonesia. Kekurangan gizi kronis pada anak berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan, baik dari segi kesehatan maupun produktivitas. Salah satu inisiatif yang tengah dijalankan untuk mengatasi masalah ini adalah Program Makanan Gratis Bergizi yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi anak-anak sekolah dan ibu

hamil, sehingga dapat menekan angka stunting yang saat ini masih berada di sekitar 21,5%.

Selain aspek kesehatan, pengembangan kapasitas tenaga kerja juga perlu diperkuat melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan balai pelatihan kerja. Program reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama bagi mereka yang terdampak perubahan ekonomi dan industri, dapat membantu meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan berpenghasilan lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.

4. Rujukan Satu Data untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Perlindungan Sosial

Pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas kebijakan perlindungan sosial. Pemerintah perlu mengembangkan sistem rujukan satu data yang mencakup informasi terkait kemiskinan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan indikator sosial-ekonomi lainnya.

Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi duplikasi penerima manfaat. Salah satu inisiatif yang dapat dimanfaatkan dalam hal ini adalah sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola oleh Bappenas. Sistem ini telah dirancang untuk menyajikan data yang lebih terperinci mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sehingga dapat menjadi referensi utama dalam perumusan kebijakan perlindungan sosial. Namun, beberapa indikator dalam Regsosek masih perlu disempurnakan agar dapat menangkap realitas sosial-ekonomi secara lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan saat ini.

Dengan adanya sistem satu data yang lebih baik, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan monitoring program secara lebih efektif, memastikan transparansi dalam implementasi kebijakan sosial, serta menyesuaikan program berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.



Referensi

BPS, 2025. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia
September 2024

BPS, 2025. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024

